

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM
INFRAKSTRUKTUR PENGEMBANGAN PEDESAAN
DI DESA MANGGENA'E KECAMATAN DOMPU
KABUPATEN DOMPU**

***ROLE OF GOVERNMENT OF COUNTRYSIDE IN SUCCESS PROGRAM
OF INFRAKSTRUKTUR RURAL DEVELOPMENT IN COUNTRYSIDE OF
MANGGENA'E DISTRICT OF DOMPU
SUB-PROVINCE OF DOMPU***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

SISKA USMIATUN
NIM 217110138

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENSUKSESKAN PROGRAM INFRAKSTRUKTUR
PENGEMBANGAN PEDESAAN DI DESA
MANGGENA'E KECAMATAN DOMPU KABUPATEN
DOMPU**

Oleh:

SISKA USMIATUN

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 5 JULI 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I



(Mardiah, S.Sos.,M.Si)
NIDN.0804117201

Pembimbing II



(M. Rahmatul Burhan, MM)
NIDN.0827068703

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



✓ Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM
INFRAKSTRUKTUR PENGEMBANGAN PEDESAAN DI DESA
MANGENA'E KECAMATAN DOMPUS KABUPATEN DOMPUS

Oleh:

SISKA USMIATUN
NIM. 217110138

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 14 Juli 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Mardiah, S.Sos., M. Si**
NIDN.0804117201



Ketua

2. **M. Rahmatul Burhan, MM**
NIDN.0827068703



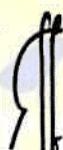
Anggota

3. **Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP**
NIDN.0822048901



Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik


✓ **Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP**
NIDN: 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali Ihsan, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah mataram:

Nama : Siska Usmiatun

Nim : 217110138

Alamat: Pagesangan Barat

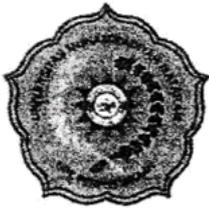
Memang benar skripsi yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Mensukseskan Program Infrastruktur Pengembangan Pedesaan Di Desa manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Adalah benar-benar asli karya dari ananda sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun. Skripsi ini adalah murni dari gagasan dan ide serta rumusan dan penelitian ananda sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dua. Jika terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari pernyataan ananda ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mat 921



NIM 217110138



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Usmiatun
NIM : 217110138
Tempat/Tgl Lahir : Dampo / 10 Oktober 2 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPa
No. Hp/Email : 085.33.8947.286 / usmiatun.siska@gmail.com
Judul Penelitian : -

Poran Pemerintah Desa dalam menfasilitasi program
infrastruktur pembangunan pedesaan di desa lingkungan
kecamatan Dampo Kabupaten Dampo

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Juli 2021

Penulis



Siska Usmiatun
NIM. 217110138

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISKA USMIA TUM
NIM : 217110138
Tempat/Tgl Lahir : Dompu / 10 oktober 1999
Program Studi : Administrasi Publis
Fakultas : FISIPOU
No. Hp/Email : 085 338 947 286 / usmiatnsiska@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Perencanaan Desa dalam mensukseskan program Infrastruktur Pengembangan Pedesaan di Desa mangrove Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Juli 2021

Penulis



Siska Usmiatun
NIM. 217 110 138

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

YAKUSA

(yakin usaha sampai)

Kegagalan adalah batu loncatan untuk menuju kesuksesan hidup kita dalam meraih masa depan yang akan datang.



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, dan kedua orang tua saya.

1. Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, SUKARDIN Dan ibundaku tercinta, NURYANI dan seluruh keluargaku sebagai wujud baktiku kepada mereka yang selalu membantu dan memberikan kasih sayang yang tiada terhingga sejauh ini merawat membina dan selalu mendoakan saya.
2. Untuk kekasihku IMAM ZIA ULHAQ terimakasih untuk waktunya selama ini yg selalu ada untuk memberikan suport dan warna semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-Teman seperjuangan kampus jurusan administrasi publik angkatan (2017) terutama sahabatku NUR SUCI ANTARSASI S.Ap yg selalu berjuang bareng dan memberikan semangat yg begitu luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta, terimakasih telah menjadi bagian dari jati diriku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran pemerintah desa dalam mensukseskan program infrastruktur pengembangan pedesaan di desa manggena’e kecamatan dompu kabupaten dompu”** Skripsi Ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsil ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

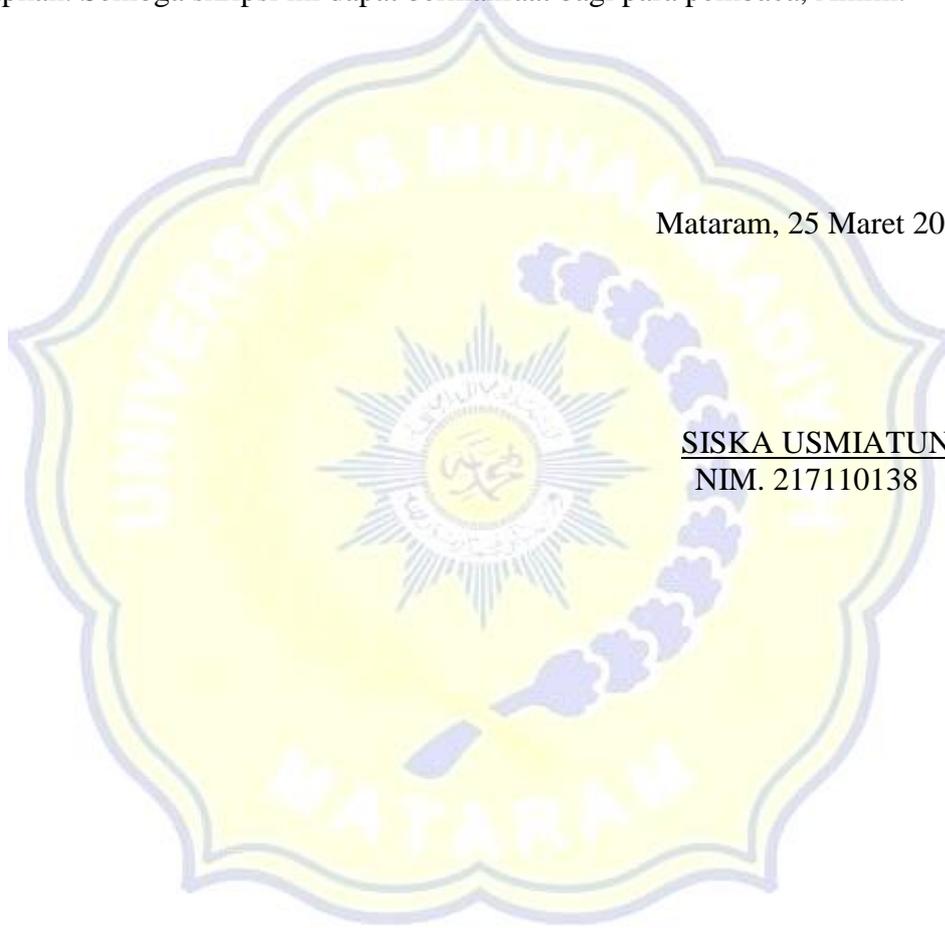
1. Bapak Drs. H.Arsyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Ali.M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Mardiah, S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak M. Rahmatul Burhan, MM Selaku Dosen Pembimbing 2 Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

7. Para Dosen yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan dan pihak luar yang tidak tangguh-tangguhnya membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Amiin.

Mataram, 25 Maret 2021

SISKA USMIATUN
NIM. 217110138



ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM INFRAKSTRUKTUR PENGEMBANGAN PEDESAAN DI DESA MANGGENA'E KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU

Siska Usmiatun,¹ Mardiah, S.Sos.,M.Si² M. Rahmatul Burhan, MM, SE.,

M.Ak³

¹Mahasiswa

²Dosen Pembimbing Utama

³Dosen Pembimbing Pendamping

Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri. Program yang dinilai memberikan dampak yang baik bagi pembangunan infrastruktur pedesaan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan dan sebagainya dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dan apa saja hambatan/kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mensukseskan program infrastruktur pengembangan pedesaan di Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data dengan cara: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini yaitu data reduction data dan data display.

Hasil penelitian dengan menunjukan Peran pemerintah desa dalam mensukseskan program infrastruktur pengembangan pedesaan di Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sebagai berikut: a) Perencanaan dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, b) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan c) Pengawasan dan pemantauan desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Faktor penghambat yang dihadapi, yaitu partisipasi masyarakat dirasakan masih perlu pendekatan, budaya malas dari masyarakat perlu mendapat perhatian serta kurangnya sarana dan prasarana sehingga menjadi terhambatnya sebagian dari program pemberdayaan pada masyarakat

Kata kunci: Peran Pemerintah Desa, Infrastruktur Pengembangan Pedesaan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN A SUCCESSFUL RURAL DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE PROGRAM IN MANGGENA'E VILLAGE, DOMPU DISTRICT DOMPU REGENCY

Siska Usmiatun,¹ Mardiah, S.Sos.,M.Si² M. Rahmatul Burhan, MM, SE., M.Ak³

¹ Student

² First Consultant

³ Second Consultant

Rural development is part of an effort to improve the quality of rural Human Resources and the community as a whole which is carried out sustainably based on the potential and capabilities of the village itself. The Rural Infrastructure Development Program, which is still being implemented and improving, has had a positive impact on rural infrastructure development. The research aims to determine what role the village government plays and what obstacles/constraints the village government faces in the success of rural development. The type of research used in this study is qualitative research with a descriptive approach, with data collection techniques using: observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study is data reduction and data display. The results of the research by addressing the role of the village government in the success of the rural development infrastructure program in Manggena'e Village, Dompus District, Dompus Regency are: a) Planning the preparation of medium-term village development plans, b) Implementation of road infrastructure development c) Village supervision and monitoring in implementation village infrastructure development. The inhibiting factors encountered, especially community engagement, are still believed to require addressing, as is the community's lazy culture and a lack of facilities and infrastructure, causing some of the community's empowerment projects to be inhibited.

Keywords: Role of Village Government, Rural Development Infrastructure



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1. Peranan.....	14
2.2.2. Pemerintah Desa	25
2.2.3. Efektivitas Program Pembangunan Infratraktur Pedesaan (PPIP).....	26
2.2.4. Efektivitas	26
2.2.5. Program.....	26
2.2.6. Infratraktur	27
2.2.7. Program Pembangunan Infratraktur Perdesaan (PPIP)	28
2.2.8. Pelaksanaan Program	29
2.2.9. Kerangka Berpikir.....	30

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3. Teknik Pemilihan Informan	32
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
4.1.1 Profil Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu	40
4.1.2 Visi Dan Misi	41
4.1.3 Struktur organisasi di Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu	42
4.2 Hasil Penelitian	
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Mensukseskan Program Infrastruktur Pengembangan Pedesaan di Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu	44
4.2.2 Hambatan/Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

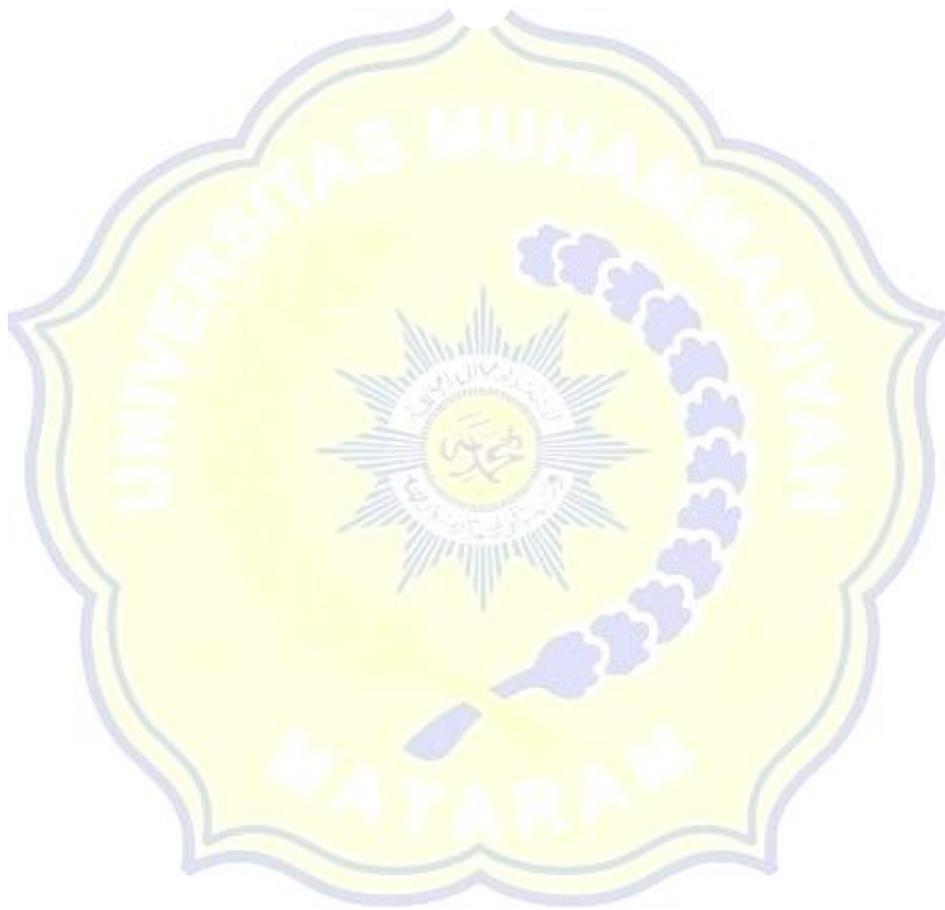
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	13
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di masa depan pembangunan desa akan menjadi semakin menantang hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang kian terbuka dan keadaan politik yang semakin demokratis. Namun kondisi desa saat ini masih tidak ada perubahan dari masa ke masa, kondisi desa saat ini masih dalam kondisi miskin dan terbelakang. Banyak pihak yang menganggap jika desa mempunyai peranan yang sangat besar bagi kota, akan tetapi dalam kenyataan yang ada desa tetap dipandang rendah dalam banyak hal, salah satunya dalam hal ekonomi. (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015).

Indonesia adalah sebuah negara dengan kepulauan terbesar yang ada di dunia, Indonesia juga merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia, sehingga Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah sosial antara lain seperti, kemiskinan dan kurangnya infrastruktur. Masalah kurangnya infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia paling relatif banyak terdapat di pedesaan, khususnya desa terpencil. Selain itu, penduduk Indonesia sebagian besarnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, penduduk yang tinggal di daerah pedesaan ini rata-rata berprofesi atau bekerja sebagai petani. Disebabkan oleh hal tersebut, Indonesia harus memiliki kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan masalah pembangunan dan rencana-rencana yang strategis dalam pembangunan pedesaan di Indonesia kedepannya. Jika hal ini tidak dilakukan atau tidak terlaksana maka

hal yang akan terjadi yaitu terjadinya masalah kesenjangan perekonomian antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan.

Hal tersebut bertolak belakang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya mengamanatkan bahwa “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Yang artinya bahwa kemiskinan merupakan tanggungjawab Negara. Untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu adanya sarana yang dapat mendukungnya seperti infrastruktur. D., Roestanto Wahidi.

Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Cipta Karya sudah melaksanakan berbagai macam program yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025, beberapa program yang sudah dikerjakan antara lain : *Rural Infrastructure Support (RISP)* tahun 2006, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sejak tahun 2007 sampai sekarang dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005.

Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan merupakan program pemerintah yang memiliki dampak yang sangat baik bagi pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan serta akan berpengaruh terhadap perekonomian dari masyarakat pedesaan, program Pembangunan infrastruktur

pedesaan sampai saat ini masih terus dikerjakan secara terus menerus, nantinya setelah selesai pembangunan infrastruktur pedesaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari masyarakat pedesaan, hal itu tentunya akan menyebabkan terselesainya permasalahan kemiskinan yang masih terus melekat pada daerah pedesaan.

Pada tahun 2018 yang merupakan hari ulang tahun Provinsi NTB yang ke 62 tahun, sudah banyak infrastruktur yang dibangun dan dikerjakan oleh lembaga Pekerjaan Umum yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan dan memiliki jumlah penduduk lebih dari lima juta jiwa, Provinsi NTB juga memiliki banyak potensi sumber daya yang sangat potensial dan tersebar pada kawasan-kawasan yang sangat strategis. Pemerintah Provinsi NTB memiliki salah satu misi yaitu Akselerasi Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan dan Kawasan Strategis yang sudah ditetapkan dalam kebijakan Pembangunan jangka menengah desa (RPJMD).

Pada saat ini provinsi NTB sudah ditetapkan sebagai pusat rujukan nasional dalam hal pengelolaan jalan, hal ini dikarenakan pembangun infrastruktur jalan di provinsi NTB yang sudah sangat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Untuk kedepannya masih sangat banyak program dan rencana pembangunan infrastruktur dari pemerintah provinsi NTB yang harus di selesaikan sehingga memerlukan usaha yang maksimal untuk dapat merealisasikan program dan rencana tersebut, salah satu program yang direncanakan yaitu program pelebaran jalan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menaikkan tingkat kemantapan jalan provinsi dari tahun ke tahun, dengan hasil mencapai 84,02% pada tahun 2018. Pemerintah juga sudah sudah memaksimalkan untuk sektor layanan irigasi, sanitasi dan layanan air bersih, ketiga layanan tersebut sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Untuk kinerja layanan jaringan irigasi dari 35 daerah irigasi kewenangan provinsi mempunyai kinerja dalam kategori sedang dan akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, Untuk cakupan sanitasi layanan perkotaan dari 55,45 persen ditahun 2014 menjadi 87,25 persen ditahun 2018, sedangkan untuk cakupan air bersih perkotaan dari 82,09 persen ditahun 2014 menjadi 92,66 persen pada tahun 2018, cakupan air bersih perdesaan dari 74,80 persen menjadi 82,49 persen. Pada daerah pedesaan ada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), program ini dikelompokan berdasarkan daerah kecamatan dan sektor yang paling banyak mendapat pembangunan infrastruktur adalah sektor pertanian. Pembangunan yang dilakukan mencakup sarana dan prasarana yang dapat memudahkan akses masyarakat serta meningkatkan mobilitas yang dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian dari masyarakat, adapun program pembangunan yang dilakukan yaitu mencakup pengerasan jalan, pembetonan jalan serta pengaspalan jalan untuk memudahkan akses dari masyarakat.

Secara umum kinerja pada bagian sektor infrastruktur kabupaten dompu masih relatif kurang baik dan belum memenuhi standar yang diinginkan. Kualitas jalan yang ada di daerah kabupaten dompu jika dilihat dari tingkat

kemantapan jalan masih memiliki nilai dibawah 50 persen, meskipun indeks mobilitas jalan dan aksebilitas jalan sudah diatas standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Demikian juga dengan aksebilitas dari infrastruktur dasarperumahan yang juga relatif rendah atau kurang dari standar yang sudah ditetapkan (tingkat sanitasi layak berada di angka kurang dari 50 persen) namun untuk air minum layak sudah memenuhi standar yang ada.

Daerah otonom merupakan daerah yang paling tua jika dilihat dari sejarahnya dimana desa terbentuk sebelum dibentuknya daerah koordinasi yang lebih luas dan terbentuk sebelum lahirnya suatu system kenegaraan. Oleh sebab itu pembangunan daerah pedesaan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualiatas sumber daya manusia (SDM) pedesaan dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan pada daerah pedesaan secara keseluruhan dan dilakukan secara berkelanjutan pembangunan ini berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang ada pada desa yang menjadi sasaran pembangunan. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan pedesaan ini mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan kehidupan dari masyarakat pedesaan yang sejahtera, maju, berkeadilan dan mandiri. (Adisasmita, 2006:3).

Keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, keterlibatan masyarakat desa ini meliputi kegiatan dari mulai perencanaan pembangunan atau proyek pembangunan sampai dengan pelaksanaan yang langsung dikerjakan oleh masyarakat lokal. Peran serta partisipasi dari masyarakat desa

pada program pembangunan pedesaan dapat dimaknai sebagai aktualisasi dari kemampuan serta kesediaan masyarakat desa untuk berkorban serta berkontribusi dalam pelaksanaan proyek atau sebuah program yang ada di masyarakat desa. (Adisasmita, 2006:34). Partisipasi dari masyarakat sangat kurang dalam melakukan evaluasi dan pemantauan dari program pembangunan yang telah selesai dilakukan, jika terdapat pihak-pihak atau oknum-oknum yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan tugas dan amanahnya dengan benar maka masyarakat akan merasa canggung dan tidak berani secara tegas untuk melaporkan kepada pihak berwajib yang dapat menangani masalah tersebut. Hal ini juga dilatar belakangi oleh masyarakat yang pasrah, kurang peduli, lebih memilih sibuk bekerja, merasa canggung untuk melaporkan, serta takut untuk menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya secara langsung, oleh karena itu menyebabkan proses dari pembangunan infrastruktur menjadi terhambat.

Seperti halnya dengan penelitian Sudarni (2015), menyatakan bahwa gambaran dari politik anggaran pembangunan infrastruktur yang ada di desa menggunakan dana dari APBD, mekanisme pengelolaan anggaran ini dilanjutkan pada SKPD kemudian dilakukan musyawarah bersama masyarakat desa terkait penggunaan anggaran pembangunan tersebut.

Seperti menurut penelitian Oki Hermansyah (2015), menjelaskan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar, hal ini menjadikan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan listrik menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat memperoleh perkembangan dan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

Sehingga menurut penelitian dari Ferdy Posumah (2015), berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap investasi yang dilakukan untuk kemajuan daerah pedesaan, sehingga pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan konsisten harus dilakukan meskipun pada daerah berkembang sekalipun.

Jadi tujuan pembangunan desa adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa, hal ini dapat didasarkan pada potensi dan kemampuan dari sumber daya alam (SDA) yang ada di desa dengan cara melakukan peningkatan kualitas hidup, prakarsa dan keterampilan dari masyarakat. Pengembangan dan peningkatan desa menuju sebuah desa yang mampu melakukan swasembada dapat dilakukan dengan pembangunan desa yang optimal baik secara SDM maupun secara pengelolaan dari SDA yang ada pada desa tersebut. Pembangunan dari sebuah desa memiliki arti membangun masyarakat pedesaan dengan memprioritaskan pada aspek kebutuhan dari masyarakat desa. (Adisasmita, 2006:4).

Adanya masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Pemerintah Desa Dalam Mensukseskan Program Infrastruktur Pengembangan Pedesaan di Desa Manggena’e Kec. Dompu Kab. Dompu”*** untuk mengetahui tentang infrastruktur yang ada di desa Manggena’e Kec. Dompu Kab. Dompu sehingga dapat menambah pengetahuan terhadap peran pemerintah desa dalam mensukseskan program pengembangan pedesaan di Indonesia terhadap masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil dua pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah agar pembahasan penelitian ini menjadi terfokus dan terarah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mensukseskan program infrastruktur pengembangan pedesaan di Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu?
2. Apa saja hambatan/kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam upaya mensukseskan program pembangunan infrastruktur pedesaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang penulis di tetapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam mensukseskan program infrastruktur pengembangan pedesaan di Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu?
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan/kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya mensukseskan program pembangunan infrastruktur pedesaan di desa Manggena'e.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, maka peneliti ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
 - a. Untuk menambah pengetahuan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang peran pemerintah desa dalam

mensukseskan program infrastruktur pengembangan pedesaan di Desa Manggena'e kec. Dompu kab. Dompu dan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang dalam kajian pengembangan pedesaan.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (SI) pada prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya program studi ilmu politik, penelitian ini dapat memperkaya referensi terutama referensi infrastruktur di Indonesia.
- b. Bagi para praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang "Program Pelaksanaan Infrastruktur di Kec. Dompu Kab. Dompu".

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran dan masukan bagi pemerintah Desa Manggena'e khususnya pemerintah di Kabupaten Dompu pada wilayah dalam mensukseskan program infrastruktur pengembangan pedesaan.

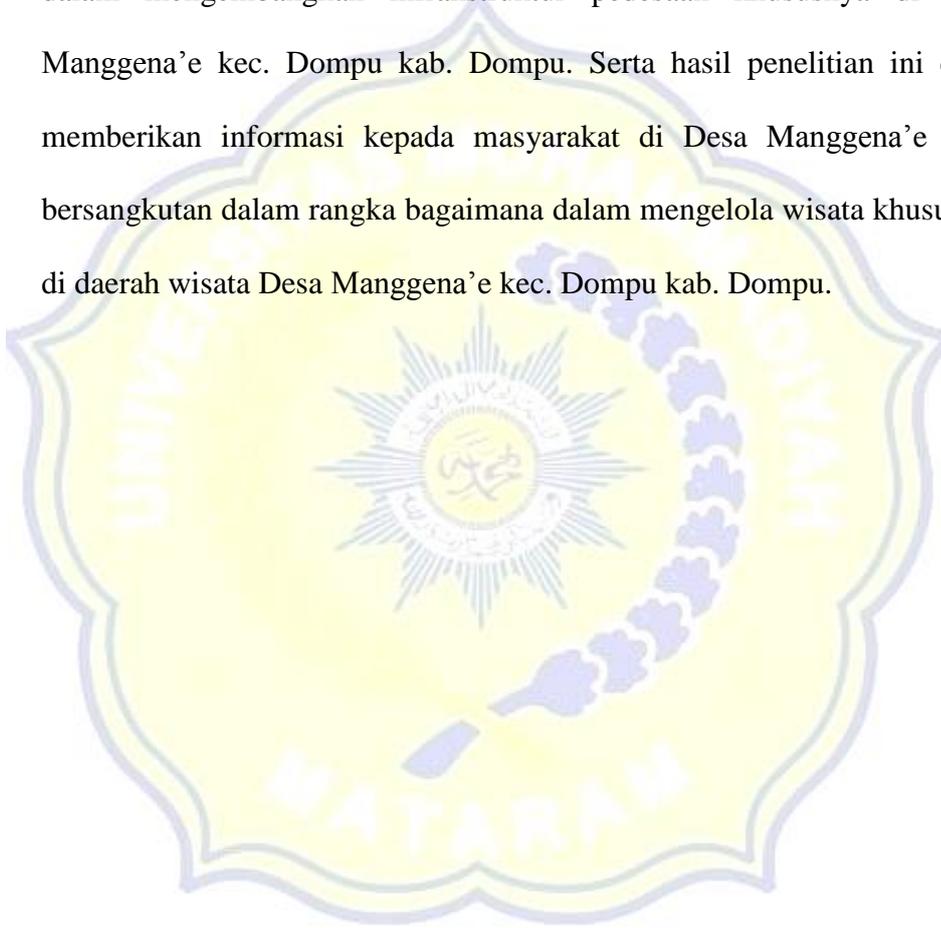
4. Manfaat pemerintahan

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya dalam pembangunan di daerah pesisir dan diharapkan mampu memberikan

kontribusi yang positif bagi pemerintah dalam mengelola atau mengembangkan potensi pedesaan.

5. Manfaat bagi masyarakat

Menambah wawasan serta pemahaman lebih mendalam terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pedesaan khususnya di Desa Manggena'e kec. Dompu kab. Dompu. Serta hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Manggena'e yang bersangkutan dalam rangka bagaimana dalam mengelola wisata khususnya di daerah wisata Desa Manggena'e kec. Dompu kab. Dompu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarni (2015), yang berjudul “Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”. Dengan Hasil penelitian menggambarkan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran infrastruktur di Desa Bululoe berasal dari APBD kemudian dilanjutkan pada SKPD untuk selanjutnya dimusyawarakkan dalam musrembang, setelahnya diserahkan pada Kelurahan atau Desa (pemerintah setempat), untuk kemudian dialurkan ketiap-tiap Dusun. Namun dalam proses pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe tidak berjalan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini karena adanya kepentingan elitpolitik dalam proses pengalokasian anggaran, belum lagi banyaknya pungutan yang membebani pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe, sebagian masyarakat masih belum puas karena beberapa program pembangunan khususnya perbaikan infrastruktur hingga saat ini belum terealisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Oky Hermansyah (2015), “Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Permasalahan yang timbul merupakan hasil disparitas pendapatan perkapita jelas antara Jawa dan luar Jawa di Indonesia. Bukti ini menggunakan

a. Konvergensi statistik.

Selanjutnya mengidentifikasi determinan pendapatan perkapita dengan mengadopsi model solo pertumbuhan dan

b. Konvergensi model.

Hasil menekankan menegaskan ketersediaan infrastruktur dasar termasuk listrik, jalan dan transportasi laut dengan kondisi yang diperlukan untuk memperoleh pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, hasilnya menunjukkan eksistensi dari konvergensi, yang mewakili laju daerah dengan rendah pendapatan perkapita penangkapan lainnya daerah dengan pendapatan yang lebih tinggi perkapita, di Indonesia dengan kecepatan 1,75persen konvergensi atau setara dengan paruh 41.14 tahun. Selanjutnya, keterbukaan akan meningkatkan produktivitas di kawasan itu karena spillover teknologi tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdy Posumah tahun (2015), yang berjudul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara” Hasil peneltian Kabupaten Minahasa tenggara merupakan salah satu daerah berkembang dengan tingkat pembangunan infrastuktur yang cukup tinggi di Sulawesi Utara baik itu dari sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertanian. Tingkat pembangunan infrastuktur yang tinggi juga secara tidak langsung akan meningkatkan investasi. Hal ini mendorong pemerintah meningkatkan jumlah infrastruktur di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur sektor pertanian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016-2017.

Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sektor kesehatan dan sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan pembangunan infrastruktur sektor pertanian berpengaruh terhadap investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Maqin tahun (2016), yang berjudul “Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat”. Hasil penelitian yaitu Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang

- 1) Kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan listrik di Jawa Barat,
- 2) pengaruh kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan listrik, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat. Penelitian ini ditandai dengan penelitian deskriptif serta verifikatif yang studinya bertujuan memberikan gambaran dan menemukan verifikasi atau meninjau dan menguji keberadaan teori empiris hubungan variabel yang dirumuskan dalam model pertumbuhan ekonomi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dan analisis data. Penelitian ini menggunakan regresi untuk mengukur efek tetap compassing dari 22 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Menunjukkan bahwa

- 1) Kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan semakin buruk, namun demikian infrastruktur listrik lebih baik dari sebelumnya di Jawa Barat,
- 2) infrastruktur Listrik, tenaga kerja dan belanja pembangunan harus positif dan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti jika tiga variabel sebelumnya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menambah atau sebaliknya. Jalan dan pendidikan infrastruktur berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan memiliki korelasi negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Sudarni 2015	Politik anggaran dalam pembangunan infrastruktur di Desa bululoe kec. turatea kab. jeneponto	Metode Kualitatif	Mengambarkan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran infrastruktur di Desa bululoe berasal dari APBD kemudian dilanjutkan pada SKPD untuk selanjutnya dimusyawarkan.	Pada penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembangunan infrastruktur desa.
2.	Ferdy Posumah 2015	Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap investasi di kabupaten	Metode kualitatif	Merupakan salah satu daerah berkembang dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi.	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif

		minahasa tenggara			
3.	Oki hermasyah 2015	Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Metode kualitatif	Menekankan menegaskan ketersediaan infrastruktur dasar termasuk listrik, jalan dan transportasi laut dengan kondisi yang diperlukan untuk memperoleh pertumbuhan yang berkelanjutan.	Persamaanya sma-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif
4.	Myrnawati Savitri 2015	Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia	Metode Kualitatif	Mewakili laju daerah dengan rendah pendapatan perkapita penangkapan lainnya daerah dengan pendapatan yang lebih tinggi perkapita, di Indonesia dengan kecepatan 1,75%; atau setara dengan paruh 41.14 tahun.	sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif
5.	Abdul maqin 2016	Pengaruh kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dijawa barat	Metode Kualitatif	untuk memperoleh bukti empiris tentang, pengaruh kondisi infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan listrik, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa barat.	Menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012), menjelaskan pengertian peranan

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Miftah Thoha (2012) menjelaskan, peranan adalah perilaku dengan rangkaian yang teratur, disebabkan oleh adanya jabatan tertentu atau dikarenakan terdapat suatu kantor yang gampang dikenali oleh masyarakat luas. Peranan juga tergantung kepada kepribadian seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peranan ini muncul dikarenakan orang yang menjalankan peran ini menyadari bahwa ketika ia bekerja harus ada tanggung jawab yang ia emban dan ia tidak bekerja sendirian.

Menurut Poerwadarminta (1995) peranan merupakan sesuatu perbuatan atau tindakan yang dikerjakan oleh sekelompok orang atau seseorang dalam suatu waktu atau suatu peristiwa. Diharapkan orang yang memiliki kedudukan di masyarakat memiliki atau mempunyai peran. Peran dan kedudukan dibutuhkan untuk keperluan atau kepentingan pengetahuan, peran dan kedudukan ini tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya.

Dari beberapa pendapat yang sudah di paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah penilaian sejauh mana fungsi dari seseorang atau bagian dari usaha untuk menunjang pencapaian dan tujuan yang ditetapkan.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

- c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasikan seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut:
- 1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

- 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 - 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
 - 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.

- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012).

Ada empat peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam pembuatan keputusan:

- a. Peranan sebagai *entrepreneur*, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
- b. Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.
- c. Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.

- d. Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012).

Menurut David Berry (2003), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Soejono Soekanto (2012) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :

- 1) Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

- 2) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - 3) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggotanya.
 - 4) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. (Soejono Soekanto: 2012).
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu.
- Ada 4 ciri utama individu, yaitu:
- 1) Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.

- 2) Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
- 3) Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
- 4) Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012).

Hal pertama yang perlu dijelaskan untuk memahami peran Pemerintah Desa adalah konsepsi tentang peran dan Pemerintah Desa. Peran menurut Soedjono (2002:260) merupakan “aspek dinamis yang kedudukan, apabila seorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal:

- a. Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan ;
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Kemudian menurut Gibson “peran merupakan seperangkat perilaku yang terorganisasi”. Konsep peranan sangat penting untuk memahami perilaku yang di harapkan yang diberikan kepada suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi. Kedudukan yang di pegang seseorang dalam organisasi. Ini mencakup posisi dalam rantai komando, jumlah wewenang yang dihubungkan dengan posisi tersebut serta fungsi dan kewajiban dari posisi itu. Peranan ini dirumuskan oleh organisasi dan berkaitan dengan posisi dan bukan dengan individu tertentu.

Sedangkan menurut Soekanto (2018: 268) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dijalankan suatu peran. Konsepsi mengandalkan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran, karna peran mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang di jalankan dalam kesehariannya (Farid,2017:13).

Jadi disini saya menggunakan teori peran menurut Soekanto (2018:268) bahwasanya apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka perilaku individu dalam bermasyarakat akan terlihat status sosialnya hanya karena peran yang dijalankannya dalam kesehariannya.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita pendapat lain tentang peran yang telah di tetapkan sebelumnya di sebut sebagai peranan normative hakekatnya peran juga dapat di rumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik dimainkan atau diperankan pemimpin tingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

2.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina

Kepala desa Manggena'e mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa Manggena'e mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa pembinaan antara lain:

1) Pembinaan dalam bidang kesehatan

Kegiatan posyandu yang ada didesa Manggena'e berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil yang dilakukan setiap 1 bulan sekali 3 posyandu ditiap dusun. Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu-ibu serta anak-anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

2) Pembinaan dalam bidang pendidikan

Pemerintah Desa Manggena'e melakukan pembinaan dibidang pendidikan salah satunya penambahan kelas PAUD Sori Kuta yang

ada di dusun sori kuta selain itu pemerintah Desa Manggena'e dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya.

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Pemerintah desa Manggena'e dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan tersebut:

1) Pelaksanaan Kerja Bakti

Pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti yang ada di Desa Manggena'e dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya hari minggu. Sebelum melakukan kegiatan kerja bakti pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan Kepala dusun, RT, RW, BPD beserta LPMD dari kegiatan tersebut kepala desa menunjuk Kepala Dusun untuk mengkoordinir untuk kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan kerja bakti akan menyatukan warga yang jarang bertemu atau jarang bersosialisasi untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

2) Perlombaan Desa

Dengan mengikuti lomba desa yang diadakan oleh Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa pemerintah Desa Manggena'e mempunyai tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat

berupa: Penguatan lembaga kemasayarakatan, peningkatan motivasi masyarakat dan swadaya melalui kegiatan gotong royong.

2.2.3 Efektivitas Program Pembangunan Infratraktur Pedesaan (PIIP)

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. *Sumb. (repository.um-palembang.ac.id)*

2.2.4 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketetapan penggunaan berbagai sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi agar memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap kehidupan masing-masing. (Martani Huseini, 1987).

2.2.5 Program

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Dye (1992), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah

kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “*whatever government chooseto do or not to do*”. Hal ini tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan public adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan public dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu. (*eprints.undip.ac.id* oleh MA Cakrawijaya)

2.2.6 Infrastruktur

Infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Sumarto (2010:84) juga mengatakan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap ekonomi.

Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan. Bila kondisi infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya jelek maka jangan berharap pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai harapan. Dalam hal ini berarti membangun infrastruktur

juga berarti membangun perekonomian, yang berorientasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003).

The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

- a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi publik utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sector transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
- b. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
- c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

2.2.7 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)

Merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan

ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP adalah:

- a. Dapat diterima (*acceptable*), pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas (*acceptable*). Prinsip ini berlaku dari sejak pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur, penentuan spesifikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan mekanismen pemeliharannya.
- b. Transparansi, penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*). Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi terkait program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.
- d. Berkelanjutan, penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat.

2.2.8 Pelaksana Program

Program PPIP memiliki kapasitas pada bidangnya secara aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi cukup tinggi terhadap pelaksanaan

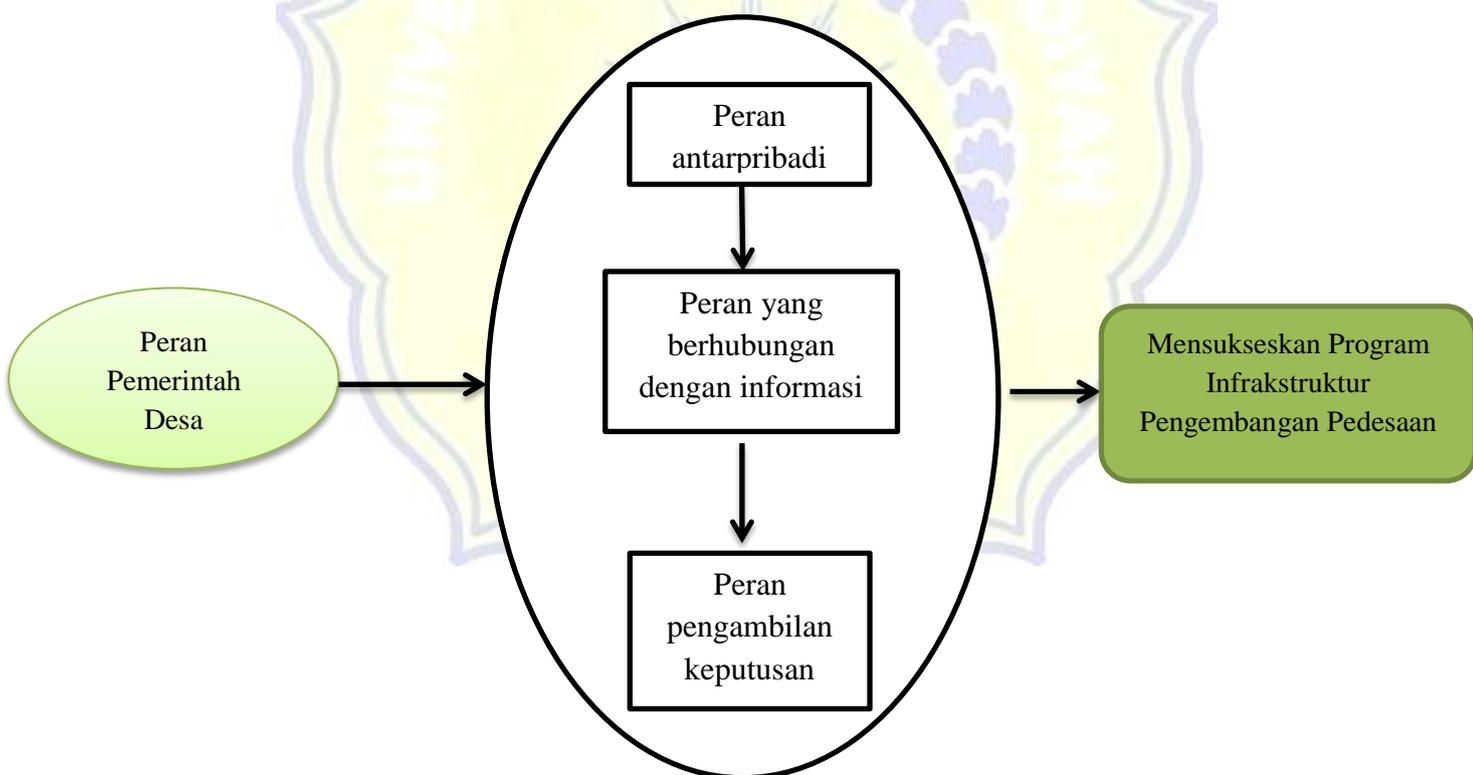
tugas dan telah mendukung keberhasilan implementasi program PPIP Desa Manggena'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Pelaksana program PPIP yang tergabung dalam tim pelaksana kabupaten dan fasilitator masyarakat untuk menjadi pelaksana di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Dompu dibagi sesuai dengan kebutuhan desa yang mendapatkan program PPIP. Fasilitator Masyarakat (FM) yang mendampingi pada saat perencanaan pembangunan memiliki bidang keahlian pada bidang teknik dan ekonomi. Hal ini untuk merencanakan Rancangan Anggaran dan Biaya pelaksanaan pembangunan jalan serta komposisi jalan tersebut oleh fasilitator di bidang teknik.

2.2.9 Kerangka berpikir

Miftah Thoha (2012) menjelaskan, Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Sebagai wujud implementasi dari undang-undang tentang pemerintahan Daerah maka undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi. Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Miftah Thoha (2012)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Dengan cara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa. Pada suatu lingkup khusus menggunakan beberapa metode alamiah. Penelitian kualitatif mampu menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaran yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang bisa diamati dalam suatu lingkup tertentu dilihat dari sudut pandang yang komprehensif.

3.2. Sumber Data

Menurut Lof Land dalam Meleong (2011) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer, Menurut Sanusi (2014) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti serta diperoleh secara langsung dari sumber asli. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten.
2. Data Sekunder, Menurut Sanusi (2014) data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan serta didapat secara tidak langsung melalui media perantara oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan ada dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu Esterbag dalam Sugiyono (2015). Wawancara dapat dibagi beberapa macam:

- a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh
- b. Wawancara semiterstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori indept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur

c. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam/semi terstruktur. Menurut Moleong (2006) wawancara mendalam (*Depth Interview*) merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah yang dipersiapkan sebelumnya. Dari teknik wawancara yang dikemukakan maka penulis menggunakan teknik wawancara mendalam, karena percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, khususnya dalam penelitian ini mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Mensukseskan Program Infrastruktur Pengembangan Pedesaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi Arikunto (2002) yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Husaini Dkk 2009). Beberapa penjelasan diatas maka dalam penelitian ini akan

digunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Mensukseskan Program Infrastruktur Pengembangan Pedesaan.

3. Observasi

Muhammad Ali dalam Mahmud (2011) observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung lazimnya menggunakan teknik. Hadi dalam Sugiyono (2015) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di wilayah Desa Manggena'e di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian awal bulan April sampai akhir penelitian.

3.5. Teknik Pemilihan Informan

Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penelitian kualitatif adalah pemilihan informan, karena informan merupakan seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik mengenai permasalahan yang diteliti dan bersedia untuk memberi informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber adalah sangat penting. Informan adalah pusat peneliti

dalam melaksanakan pengumpulan data untuk menginformasikan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknis sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk dinas perhubungan karena sudah diketahui tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Peran Pemerintah Desa dalam Mensukseskan Program Infrastruktur Pengembangan Pedesaan. Artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh key informan (informan kunci) yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya.

Dalam penentuan informan peneliti memilih dua informan diantaranya:

1. Staf Kantor Desa
2. Sekertaris Desa

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Taylor, dalam Nasution (2003). Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles & Huberman (1992) menyatakan bahwa ada dua jenis metode analisis data kualitatif yaitu:

1. Analisis mengalir (*flow Analysis Model*) Dimana dalam model analisis mengalir terdapat 3 komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan saling mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan.
2. Model Analisis Interaksi (*Interaktif Analysis Models*) Dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka 3 komponen analisis yaitu: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan yang saling berinteraksi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis interaksi dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Reduksi data nantinya akan menghasilkan gambaran dan langkah yang jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini nantinya akan dibuat ringkasan awal hasil dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang sudah ditentukan serta akan memfilter beberapa temuan pada penelitian yang berlangsung di lapangan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penyajian data bisa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Peneliti tidak kesusahan dalam menguasai informasi baik dengan semua atau tugas-tugas tertentu dari hasil penelitian.

3. *Conclusion Drawing or Verification* (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi) Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang dapat berupa deskripsi data suatu obyek.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011) terdapat empat kriteria keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknis pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzindalam Moleong (2011). Membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Dalam penelitian ini, melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni pihak Kantor Administrasi Bandar Udara Komodo. Selain itu peneliti

melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

2. Kecukupan referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

